

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia, 2003, Sumber daya pendidikan memiliki krusial dalam menunjang terlaksananya proses pendidikan yang bermutu. Sesuai Pasal 1 butir 23, yang menyebutkan sumber daya pendidikan merupakan seluruh komponen yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berisi personil sumber daya manusia pendidikan, partisipasi masyarakat, aspek pembiayaan, serta fasilitas dan infrastruktur penunjang. Hal tersebut menegaskan bahwa capaian pendidikan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kualitas guru, relevansi kurikulum, serta kecukupan dan efektivitas pengelolaan sumber daya pembelajaran.

Lebih lanjut, dalam Pasal 45 dipaparkan bahwa seluruh lembaga pendidikan, mencakup jalur formal maupun nonformal, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi kebutuhan pendidikan yang selaras dengan tumbuh kembang kemampuan fisik, aspek aspek kognitif, afektif, dan psikososial, peserta didik. Dengan demikian, sarana dan prasarana pendidikan tidak sekedar berfungsi sebagai kelengkapan fisik, melainkan juga berperan sebagai perangkat strategis yang menunjang perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Selanjutnya, dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Langkah tersebut bertujuan menjamin keseragaman standar

nasional terkait penyediaan serta tata kelola sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan. Dengan demikian, disparitas dapat diminimalkan dan seluruh peserta didik berhak mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak dan unggul.

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia, 2003, evaluasi pendidikan menjadi unsur pokok dalam pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 21, evaluasi pendidikan dimaknai sebagai aktivitas pengawasan, penjaminan, serta penetapan standar mutu pendidikan yang diterapkan pada seluruh unsur pendidikan di berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Definisi ini menekankan bahwa evaluasi tidak semata-mata berperan sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan mutu yang integral dalam sistem pendidikan.

Lebih lanjut, Pasal 57 menjelaskan peran strategis evaluasi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan pada tingkat nasional sebagai wujud pertanggungjawaban pihak yang menyelenggarakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk evaluasi yang dilakukan harus berorientasi pada peningkatan mutu dan dilakukan secara transparan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Ayat (2) ditegaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal mencakup seluruh tingkatan, unit penyelenggara, serta bentuk pendidikan. Artinya,

cakupan evaluasi bersifat menyeluruh meliputi unsur *input* (peserta didik), proses dan *output* pendidikan (program dan lembaga) dan kebijakan ini diberlakukan secara menyeluruh pada berbagai tingkatan dan bentuk pendidikan, mencakup jenjang dasar, menengah, dan tinggi, serta jalur pendidikan nonformal.

Dengan demikian, evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas tidak hanya berperan dalam menilai hasil, tetapi juga merupakan proses sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana, model evaluasi program model yang digunakan yaitu CIPP, yang mencakup aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Pemilihan model CIPP sebagai instrumen evaluasi didasarkan pada kesesuaiannya dalam membantu pimpinan dan administrator dalam proses pengambilan keputusan yang optimal. Pernyataan itu sejalan dengan uraian yang dikemukakan oleh Agung menyatakan evaluasi dipandang sebagai suatu rangkaian proses yang mencakup pendeskripsian, penelaahan, dan penyajian informasi yang relevan untuk menunjang pengambilan keputusan secara optimal (Agung, A. A. G. & Koyan, 2016). Disamping itu kelebihan menggunakan model CIPP model CIPP menawarkan metode yang komprehensif dalam kegiatan penilaian dengan tujuan menyajikan deskripsi yang mendalam dan menyeluruh mengenai suatu program, dimulai dari aspek konteks hingga tahap pelaksanaan (Stufflebeam, D.L & Shinkfield, 2007).

Guna mendapatkan data terkait hasil evaluasi program pengelolaan sarana dan prasarana tersebut, perlu dilakukan penelitian yang menerapkan model evaluasi CIPP. Adapun hal-hal yang dievaluasi meliputi: 1) evaluasi pada aspek konteks yang menyajikan data mengenai: kebutuhan, latar belakang dan tujuan

manajemen sarana dan prasarana ; 2) Evaluasi pada komponen input bertujuan menyediakan informasi mengenai ketersediaan sumber daya, yang meliputi tenaga manusia, alokasi anggaran, serta fasilitas pendukung; 3) Evaluasi pada komponen process berfungsi memberikan informasi mengenai pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana; 4) Evaluasi pada komponen product bertujuan memberikan informasi mengenai hasil maupun dampak yang ditimbulkan terhadap efektivitas pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah.

SMP Negeri 14 Denpasar termasuk dalam kategori jenjang SMP berstatus negeri yang berlokasi di Jalan WR. Supratman Nomor 224, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Institusi ini menempati areal seluas ± 49.000 m² dan berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sekolah tersebut menyelenggarakan 23 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik mencapai ± 963 siswa, serta didukung oleh 58 tenaga pendidik dan kependidikan (Sekolah, 2025).

Dari aspek sarana dan prasarana, SMP Negeri 14 Denpasar telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar layanan pendidikan. Pada awalnya sekolah hanya memiliki 14 ruang kelas, namun seiring dengan meningkatnya jumlah siswa, Pemerintah Kota Denpasar menambah pembangunan gedung tiga lantai dengan 9 ruang kelas baru pada tahun 2024, sehingga total ruang kelas mencapai 23 unit. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap penyediaan ruang belajar yang memadai dan representatif bagi peserta didik.

Selain ruang kelas, sekolah ini juga memiliki sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran. Laboratorium komputer dilengkapi perangkat PC dengan spesifikasi yang memadai serta akses internet berkecepatan hingga 50 Mbps, yang digunakan

untuk mendukung literasi digital siswa. Perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat sumber belajar, menyediakan koleksi buku akademis maupun bacaan umum untuk memperkaya wawasan siswa. Untuk pembelajaran sains, sekolah memiliki ruangan laboratorium IPA, meskipun data resmi Dapodik belum mencatat keberadaan laboratorium tersebut secara lengkap.

Fasilitas lain yang tersedia adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS), obat-obatan dasar, serta ranjang untuk siswa yang membutuhkan perawatan darurat. Pada bidang olahraga, sekolah ini dilengkapi dengan lapangan serbaguna yang dimanfaatkan untuk menunjang beragam aktivitas, antara lain bola basket, bola voli, futsal, hingga cabang atletik. Lingkungan sekolah juga dijaga keamanannya oleh petugas satpam, dengan suasana halaman yang cukup asri dan kondusif untuk belajar.

Dari aspek sanitasi, data resmi mencatat terdapat 11 unit jamban yang dapat digunakan siswa, dan sekolah ini juga tercatat telah menyediakan fasilitas khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, informasi yang lebih detail terkait jumlah sarana cuci tangan serta ketersediaan sabun dan air mengalir, serta sistem pengelolaan limbah belum sepenuhnya terdokumentasi dalam data publik. Hal ini menjadi celah yang penting untuk dilakukan kajian evaluatif, terutama dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah benar-benar memenuhi standar layanan pendidikan yang sehat, aman, dan inklusif.

Secara keseluruhan, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa SMP Negeri 14 Denpasar telah memiliki basis fasilitas yang tergolong memadai untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Namun, seiring perkembangan kebutuhan pendidikan abad 21 dan meningkatnya jumlah siswa, keberadaan sarana dan prasarana tersebut perlu dievaluasi supaya selaras dengan

standar mutu pendidikan nasional. Evaluasi ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa manajemen fasilitas dan infrastruktur pada lembaga pendidikan formal tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek kuantitas, melainkan juga mencakup kualitas serta keberlanjutannya.

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, ditemukan sejumlah persoalan yang mampun diinventarisasi antara lain.

1. **Komponen *Context* (Konteks): Ketidaksesuaian Sarana dan Prasarana dengan Kebutuhan Pendidikan.**

Meskipun sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa sarana dan prasarana harus diberikan berdasarkan perkembangan potensi siswa, dalam konteks nyata masih ditemukan ketidaksesuaian antara fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan aktual siswa pada beragam tingkatan dan bentuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini mencerminkan masalah dalam pemetaan kebutuhan dan penetapan tujuan penyediaan sarana prasarana secara tepat.

2. **Komponen *Input*: Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengadaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana**

Berdasarkan Pasal 1 butir 23, Sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari komponen sumber daya pendidikan. Namun, banyak satuan pendidikan menghadapi kendala dalam hal pendanaan, perencanaan, serta

tenaga teknis yang kompeten untuk mengelola dan memanfaatkan sarana prasarana secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya input yang mendukung pencapaian mutu pendidikan.

3. Komponen *Process*: Evaluasi Sarana dan Prasarana Belum Dilakukan Secara Sistematis dan Berkelanjutan

Evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 seharusnya mencakup lembaga, peserta didik, dan program pendidikan. Namun, pelaksanaan evaluasi terhadap aspek sarana dan prasarana masih belum dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Banyak satuan pendidikan belum memiliki mekanisme evaluasi internal yang dapat mengukur efektivitas penggunaan sarana dan prasarana secara berkala.

4. Komponen *Product*: Rendahnya Dampak Positif Sarana Prasarana terhadap Mutu Layanan Pendidikan

Sarana dan prasarana semestinya berperan signifikan dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, banyak lembaga pendidikan belum menunjukkan output atau hasil yang signifikan dari penggunaan sarana prasarana yang ada, baik dari segi peningkatan hasil belajar, kenyamanan belajar, maupun efektivitas pembelajaran secara keseluruhan.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada pemetaan permasalahan, oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Evaluasi Program Manajemen Sarana dan Prasarana dengan memakai pendekatan evaluasi CIPP (*context, input, process, product*).

1.4 Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada kajian ini yaitu.

1. Bagaimanakah implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar dilihat dari aspek *context*?
2. Bagaimanakah implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar dilihat dari aspek *input*?
3. Bagaimanakah implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar dilihat dari aspek *process*?
4. Bagaimanakah implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar dilihat dari aspek *product*?
5. Bagaimanakah implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar ditinjau dari segi *context, input, process, product (CIPP)*?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam evaluasi implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar dan bagaimana upaya pemecahannya?
7. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut.

1. Menganalisis pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar berlandaskan tinjauan komponen *context*.

2. Menganalisis pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar berlandaskan tinjauan komponen *input*.
3. Menganalisis pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar berlandaskan tinjauan komponen *process*.
4. Menganalisis pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar berlandaskan tinjauan komponen *product*.
5. Menganalisis pelaksanaan program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar berlandaskan tinjauan komponen *context, input, process, product* (CIPP).
6. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan dalam evaluasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar, sekaligus merumuskan upaya pemecahannya.
7. Mendeskripsikan upaya yang ditempuh guna menanggulangi kendala pada implementasi program manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 14 Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

- a. Temuan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji evaluasi implementasi program manajemen sarana dan prasarana.
- b. Temuan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan pendidikan, khususnya pada bidang pendidikan kesetaraan program pengelolaan sumber daya sarana dan prasarana ditinjau lewat model evaluasi CIPP (*context, input, process, dan product*).

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan deskripsi mengenai evaluasi program manajemen sarana dan prasarana.
- b. Bagi instansi pemerintah daerah yang membidangi pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di Kota Denpasar, hasil penelitian ini memberikan manfaat terhadap proses manajemen sarana dan prasarana.
- c. Bagi Direktur Jenderal, temuan studi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat efektivitas manajemen sarana dan prasarana sebagai dasar perumusan kebijakan pada masa mendatang.

